

BAB IV

PENUTUP.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis yuridis perbedaan perlakuan kebudayaan terhadap masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bahwa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat menimbulkan persoalan bagi masyarakat Kepulauan Mentawai yang mengacu kepada isi Undang-Undang tersebut yakni Pasal 5 huruf C. Masyarakat kepulauan Mentawai sangat menyayangkan dalam Undang-Undang tersebut malah mendiskriminasikan budaya dan Undang-Undang itu juga belum mengakomodir serta mengakui budaya Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya Perlindungan hukum perbedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan cara:
 - a) *Judicial Review*
 - b) Usulan Revisi Undang-Undang Oleh DPR

B. Saran

1. Dalam pembentukan Undang-Undang berbasis daerah harus melibatkan Partisipasi masyarakat seperti tokoh adat .
2. Dalam Pembentukan Undang-Undang daerah yaitu DPR dan Presiden harus memperhatikan secara regulasi bentuk format daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Ary H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Bambang Rudito, 2013, *Bebetei Uma Kebangkitan orang Mentawai : sebuah etnografi*, Gading dan Indonesia Center For sustainable Development (ICSD), Yogyakarta
- Danandjaja, James, 2003, *Diskriminasi Terhadap Minirotas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu di Tanggulangi segera*, Universitas Indonesia
- Wayan Resmini, SH., MH Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd, 2018, *Kebijakan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Toleransi*, Dream Litera, Malang
- Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Catatan ke-3 Balai Pustaka, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2015 *Dalam Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia-Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pustaka pajar, Yogyakarta
- Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius*". Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, ., 2017, *Sosiologi suatu pengantar* Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yudi Latif, 2017 '*Pancasila Sebagai Ideologi Negara*', *Tantangan Kini dan Mendatang*, GuePedia, Jakarta

Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Renata Arianingtyas dan Siti Aminah, 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan

Robert Audi, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta

Stefano Coronese, 1986, *Kebudayaan suku Mentawai*, Grafindian jaya, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perancangan Perundang- Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 97/PUU-XX/2022 alam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Sumber lain

<http://www.sukumentawai.org/id/sejarah/> , diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.38 WIB

<https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> , Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/mentawai-sebaran-bangunan-pertahanan-di-pulau-terluar-pantai-barat-sumatera/>, diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 18.10. WIB

<https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> , Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

<https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/7.2.2->, Bambang-Rudito., diakses 9 Agustus 2023 , pada pukul 14.00 WIB.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-diskriminasi-dan-contoh-tindakannya-20jqdVU6Qv/1>, Kumparan, diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pada pukul 23.00 WIB

http://repository.unp.ac.id/1028/1/MAZZIA%20LUTH_1140_94,1994 Mazzia Luth, Unsur-Unsur Kebudayaan-Kebudayaan, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 19.45 WIB

<https://www.merdeka.com/jateng/fungsi-budaya-dalam-kehidupan-masyarakat-wajib-dipahami-kln.html> , diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, Pukul 01.23 WIB

<https://sumbarprov.go.id/home/news/9280-asal-usul-sumatera-barat-sejarah-minang-kabau>, diakses pada 1 Agustus 2023, Pukul 23.00 WIB

Antropologi suku bangsa, <https://materiips.com/suku-jambi>, diakses Pada 2 Agustus 2023, Pukul 03.00 WIB.

Redaksi, <https://www.jernih.id/5-budaya-jambi-telah-diakui-sebagai-budaya-nasional-ini-daftranya>, diakses pada 2 Agustus 2023, pada pukul 03.49 WIB.

<https://kabarapik.com/mengenal-budaya-riau-dari-kesenian-rumah-adat-senjata-dan-tarian/>, diakses pada 2 Agustus 2023, pada pukul 05.00 WIB

DwiFatimah,

<https://www.riauonline.co.id/wisata/read/2022/05/10/mengenal-budaya-di-bumi-melayu-riau>, diakses pada 2 Agustus 2023, Pada Pukul 05.33 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18717> , MKRI , diakses pada tgl 2 Agustus 2023, Pada pukul 17.39 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislativereview--judicial-review-di-republik-indonesia>, diakses pada 4 Agustus 2023, pada pukul 23.00 WIB

<https://langgam.id/dinilai-diskriminatif-aliansi-mentawai-bersatu-minta-uu-provinsi-sumbar-direvisi/>, Langgam

<https://padangkita.com/uu-sumbar-belum-akomodasi-budaya-mentawai-yudas-sabaggalet-kami-minta-keadilan/>, Fakhrudin Arrazzi diakses pada tanggal 23 Januari 2024 pada pukul 19.54 WIB

<https://langgam.id/dinilai-diskriminatif-aliansi-mentawai-bersatu-minta-uu-provinsi-sumbar-direvisi/>, Langgam diakses pada tanggal 23 Januari 2024 Pada pukul 19.59 WIB

D. Jurnal

Retno Marwani Sukmariningsih, 2013, Arti Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden dalam proses uji materi Undang-undang, *Pentingnya Keterangan DPR dan Presiden, Uji Materil, Mahkamah Konstitusi*, Vol 2, Desember 2013

M Fadli Efendi, 2020, *Mekanisme Legislative Review peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam perspektif Politik Hukum*, Vol 7, Oktober 2020

Noni Sukmawati, 2008, *BAGURAU SALUANG DAN DENDANG DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN BUDAYA MINANGKABAU*, Volume 35, Nomor 2 Desember 2008

Nurul Qamar, 2012, *KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI*, *Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012

Nurdien Harry Kistanto, 2008 *Tentang Konsep kebudayaan*, Universitas Diponegoro

Joko Kuncoro, 2008 *Prasangka dan diskriminasi UNISSULA*, Semarang

R Fajriani, 2018, Skripsi *perbandingan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa pada rezim orde baru dan pasca orde baru*, Tasikmalaya

Tasmuji, Dkk, 2011, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Upt Mataram University Press